

**ANALISIS PENERAPAN
SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD)
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (BPKAD) KOTA DUMAI**



UNTAR
Universitas Tarumanagara

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : BENNY HELMI

NIM : 126232128

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2024

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENERAPAN
SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD)
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (BPKAD) KOTA DUMAI**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : BENNY HELMI

NIM : 126232128

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT UNTUK KELULUSAN PADA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
TARUMANAGARA**

JAKARTA

2024

**ANALISIS PENERAPAN
SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD)
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH (BPKAD) KOTA DUMAI**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:



Benny Helmi

126232128

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Dr. Sriwati, S.E., M.Ak., Ak., CA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dimanfaatkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mengelola keuangan daerah. SIPD merupakan aplikasi yang diwajibkan oleh pemerintah pusat untuk mendukung proses perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan di tingkat pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh dari wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SIPD baru digunakan oleh BPKAD Kota Dumai pada tahapan perencanaan dan penganggaran. Terdapat kelemahan yang masih dihadapi dalam penerapan SIPD.

Kata Kunci: Sistem Informasi Pemerintah Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; hambatan

ABSTRACT

This research aimed to examine the use of the Regional Government Information System (SIPD) utilized by the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) in managing regional finances. SIPD is an application mandated by the central government to support the processes of planning, administration, and financial reporting at the regional government level. This research employs a qualitative descriptive method with data obtained through interviews. The results show that SIPD has only been implemented by BPKAD Dumai City in the planning and budgeting stages. The results indicate that SIPD has only been implemented by BPKAD Dumai City in the planning and budgeting stages. However, several challenges remain in the implementation of SIPD.

Keywords: *Regional Government Information System; Regional Financial and Asset Management Agency; obstacle*

KATA PENGANTAR

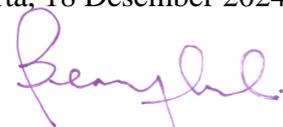
Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan lancar. Tak lupa, penulis juga mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi umat manusia dalam mencapai kebaikan. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis memperoleh bimbingan, bantuan, dan dukungan yang besar dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Rektor Universitas Tarumanagara;
2. Prof. Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Jamaludin Iskak, M.Si., Akt., CPI, CA, CPA, selaku Ketua Program Studi Profesi Akuntan;
4. Sriwati, SE. MAk, selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini;
5. Seluruh dosen di PPAk FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan;
6. Seluruh anggota keluarga yang telah memberikan dorongan dan motivasi sepanjang proses perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis juga berharap agar tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dari berbagai latar belakang. Selain itu, penulis mohon maaf apabila selama penyusunan tugas akhir ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Jakarta, 18 Desember 2024



Benny Helmi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II LANDASAN TEORI.....	3
2.1 Konsep Implementasi	3
2.2 Efektivitas	4
2.3 Sistem Informasi.....	5
2.4 Sistem Informasi Pemerintah Daerah	6
2.5 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	7
BAB III METODE PENELITIAN.....	9
3.1. Jenis Penelitian	9
3.2. Lokasi dan Objek Penelitian.....	9
3.3. Narasumber.....	9
3.4. Teknik Pengumpulan Data	9
3.5. Teknik Analisis Data	10
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	12
4.1. Hasil Penelitian.....	12
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	12
4.1.2 Implementasi SIPD	12
4.1.3 Efektivitas Aplikasi SIPD.....	18
4.1.4. Keunggulan SIPD dibanding SIPKD	20
4.2. Pembahasan	20
4.2.1 Implementasi Aplikasi SIPD pada BPKAD Kota Dumai	20
4.2.2 Efektivitas Aplikasi SIPD.....	24
4.3.1 Keunggulan SIPD dibanding SIPKD	26

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	27
5.1. Simpulan.....	27
5.2. Saran	27
REFERENSI	29
LAMPIRAN.....	31

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka penelitian	8
Gambar 4.1 Struktur organisasi BPKAD Kota Dumai	12

BAB I

PENDAHULUAN

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, pemerintah telah menetapkan aturan terkait penggunaan sistem informasi untuk mempermudah penyampaian informasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dirancang dan dikembangkan untuk menyajikan layanan informasi yang saling terhubung dan terintegrasi secara elektronik antara instansi-instansi pemerintah daerah. Langkah ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 391 dan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait SIPD mencakup informasi keuangan daerah. Informasi ini meliputi: a. perencanaan anggaran daerah, b. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, c. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, d. pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, e. barang milik daerah, dan f. informasi lainnya mengenai Keuangan Daerah.

Walaupun sudah terdapat aturan mengenai SIPD, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari penelitian terdahulu. Pada tahap awal penerapan SIPD sejumlah instansi mengalami berbagai kendala, seperti sistem yang sering mengalami eror dan menghambat proses kerja, yang membuat beberapa instansi memilih tetap menggunakan sistem lama (Vitriana et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Fahzura dan Najamudin (2022) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat mengungkapkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah belum berjalan secara optimal.

Dari penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan SIPD di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum berjalan sepenuhnya optimal. Beberapa SKPD masih menghadapi tantangan dalam penggunaan aplikasi ini, baik dari segi sistem, sumber daya, komunikasi, maupun faktor-faktor lainnya.

Observasi awal dan wawancara pendahuluan penulis dengan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Dumai pada bulan Februari

Tahun 2024 menemukan beberapa masalah terkait penerapan aplikasi SIPD. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Hampir setiap tahun terdapat Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pemutakhiran pengelompokan atau klasifikasi, pengkodean atau kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang menyebabkan sering terjadinya penghapusan dan input ulang data.
- 2) Aparatur/operator SIPD masih belum paham dalam mengoperasikan fitur-fitur karena kurangnya pendampingan intensif dari pusat ke daerah.
- 3) Penginputan data sering *error* karena servernya tidak kuat ketika penginputan data dalam waktu bersamaan.
- 4) Menu evaluasi APBD belum dapat digunakan sehingga Evaluasi APBD dilakukan manual oleh Pemerintah Provinsi.
- 5) Kurang responnya *help desk* Kemendagri dalam mengakomodir dan menyelesaikan permasalahan teknis SIPD.

Sampai dengan Tahun 2024 BPKAD Kota Dumai menggunakan aplikasi SIPD pada tahap perencanaan dan penganggaran. Sementara itu, untuk penatausahaan laporan keuangan dan aset daerah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang merupakan pengembangan dari Kementerian Dalam Negeri dan pihak swasta. Dalam pengelolaan aset daerah BPKA Kota Dumai sampai saat ini masih menggunakan aplikasi e-BMD yang sepenuhnya dari Kementerian Dalam Negeri.

Merujuk pada uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi dan memahami secara kualitatif proses penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penelitian ini berfokus pada: (1) implementasi SIPD di Kota Dumai menggunakan kerangka teori Edward III, yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi; (2) efektivitas SIPD dalam menyajikan informasi untuk perencanaan keuangan dan aset daerah Kota Dumai; serta (3) keunggulan aplikasi SIPD dibandingkan aplikasi SIPKD.

REFERENSI

- Amanah, N. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Pembangunan Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang. Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, John W, 2014, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Fahzura, L., & Najamudin. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Social and Policy Issues*, Vol. 2, (7-130).
- Fridayanthie, E., & Charter, J. (2016). Rancang bangun sistem informasi simpan pinjam karyawan menggunakan metode object oriented programming (studi kasus: PT. Arta Buana Sakti Tangerang). *Jurnal Techno Nusa Mandiri*, 13(2), 149-156.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton University Press.
- Grandis, E. T. (2018). Efektivitas Penerapan Sistem E-Planning Program Pembangunan Daerah Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 6 (103-113).
- Kotter, John P. 1996. *Leading Change*. Boston: Harvard Business School Press.
- Lexy J. Moleong, (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press
- Mette, D. V. & Carl, V. H. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Sage, Vol 6, 1975.
- Miles, M., & Huberman, A. (1994). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publisher.
- Nasution, M.I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Volume 9 (109-116).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintah Daerah. 25 September 2019. Jakarta.

- Spradley, J.P.(1979) *The ethnographic interview*, New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syahrudin. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Kementerian Sekretariat Negara RI. Jakarta.
- Vitriana, N., Agustiawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal*, 1(1), 64.
- Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. Journal Administration and Society.
- Weber, M. 1922. *The sociology of religion*. Beacon, New York: Beacon Press.